

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian yang dahulu penulis memakai untuk menjadikannya sebuah landasan dalam menyusun penelitian dengan tujuan untuk memahami hasil-hasil yang telah dilaksanakan oleh peneliti, serta sebagai perbandingan dan ilustrasi yang bisa menunjang untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang mempunyai persamaan. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu:

Penelitian pertama berjudul “EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAN SAMPAH KABUPATEN KOTA DUMAI (PASCA STUDI PEMBERIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KABUPATEN DI BIDANG SAMPAH” yang dilaksanakan oleh (Hildawati, 2018). Penelitian ini berupaya untuk mempopulerkan peraturan pengelolaan sampah di kecamatan Kota Dumai. Berdasarkan temuan penelitian, masih kurangnya kolaborasi dengan organisasi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, dalam hal penugasan wilayah kerja pemungutan retribusi dan pemberian bimbingan teknis serta pelaksanaannya. Aturan dan prosedur untuk menetapkan tugas, sumber daya, dan infrastruktur tidak memadai. mendorong penggunaan izin yang bertentangan. Pemerintah Kota Dumai masih banyak menerima pengaduan terkait permasalahan yang belum terselesaikan ini.

Penelitian kedua berjudul “EVALUASII KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO” oleh (Christian Mamahit, Herman Najoran, 2021). Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui faktor yang bisa mempengaruhi peraturan pengelolaan sampah Kota Manado. Menurut dari Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2010), penulis penelitian ini mengadopsi teknik sudut pandang kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado tidak selalu berjalan baik dalam hal ketepatan waktu pengangkutan sampah ke TPS. Kebetulan permasalahan pengelolaan sampah muncul dari waktu ke waktu. pengelolaan. Kendaraan yang mengangkut sampah yang kerap disebut juga dengan motor sampah yang tiba-tiba saja mogok. Persoalan lainnya adalah jumlah sampah sepeda motor di setiap kecamatan tidak sebanding dengan jumlah lingkungan yang sudah ada. Kurangnya operasional pembuangan sampah dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado. Selain itu, tak jarang juga pesepeda motor yang melalui membuang sampah dimana-mana /sembarangan dan terlambat. Dalam hal ini, nampaknya masyarakat secara keseluruhan kurang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk membuang sampah sebelum batas waktu yang ditentukan. Tidak adanya keberatan masyarakat terhadap program pengelolaan sampah Kota Manado menunjukkan responsifnya kebijakan tersebut. Jumlah ini masih sedikit karena sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan belum mendarah daging, kerusakan sepeda motor sampah menghambat protes terhadap

pengangkut sampah, dan peraturan pengelolaan sampah Kota Manado yang lebih ketat dapat dikompromikan. Hal ini dapat dilihat di Kota Manado Bersih (Bebas Sampah), dimana berbagai kecamatan kini mempunyai inisiatif pengelolaan sampah, seperti program bank sampah Kecamatan Sario dan program TPSS dan TPS 3R Kecamatan Tuminting, Kecamatan ini mempunyai bank sampah, namun belum digunakan karena sedang dilakukan modifikasi. Selain itu, tidak terdapat program pengelolaan sampah karena misalnya dari program TPS 3R memerlukan penyiapan lahan seluas 200 m² sehingga menyulitkan kecamatan lain untuk memperoleh properti.

Penelitian ketiga yang berjudul “INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR POLID WASTE MANAGEMENT IN CEBU CITY, PHILIPPINES” dilakukan oleh (Rico C. Angogl, Nestor D. Archival dan Carmelita M. Rebancos, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan timbulan sampah pada tahun 2007-2009, dan tidak menemukan dampak pengurangan yang signifikan secara statistik dari peraturan dan strategi sampah sebelumnya yang diterapkan pada tahun 1990 dan 2004 ($p\text{-value}=0,431 < \alpha=5\%$). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis melalui tinjauan intensif terhadap data sekunder mengenai volume, skema pengumpulan, biaya limbah dan pemantauan yang diambil dari Departemen Pelayanan Publik (DPS) Kota Cebu dan Tim Sanitasi dan Penegakan Lingkungan Cebu (CESET). Wawancarai anggota Dewan Kota Cebu dan kepala departemen pemerintah kota. Uji Friedman digunakan untuk menganalisis dampak pengurangan peraturan pengelolaan sampah padat yang

diterapkan oleh Dewan Kota Cebu yang disahkan pada tahun 1990 dan 2004. Hasil penelitian ini adalah Seperti halnya Kota Cebu, kunci terpenting dalam pengelolaan sampah adalah Jika Agar program berhasil, keterlibatan masyarakat diperlukan ketika Program yang dilaksanakan memberikan insentif ekonomi ditambah dengan skema penegakan hukum yang ketat untuk menjamin program pengelolaan sampah kota yang berkelanjutan. Partisipasi penuh dalam berbagai sektor masyarakat seperti bisnis, organisasi non-pemerintah, dewan barangay, dan lain-lain, harus dimanfaatkan untuk memastikan partisipasi program yang komprehensif. Dengan terbatasnya pendanaan dan kemampuan teknologi, kemitraan dengan kelompok lokal dan internasional untuk memajukan pengelolaan limbah padat perkotaan sangatlah penting. Perbedaan pengaturan kelembagaan yang disajikan dalam penelitian ini tidak hanya terjadi di Kota Cebu. Namun, tipologi pengaturan antara dan antar pemangku kepentingan yang berbeda termasuk dukungan dari dalam dan luar Kota Cebu memberikan perpaduan strategi yang diperlukan untuk pengelolaan sampah padat yang kompleks dalam konteks unit pemerintah daerah yang sangat urban. Tantangan yang tersisa yang dihadapi Kota Cebu adalah bagaimana menjamin kelangsungan program pengelolaan limbah padatnya. Hal ini dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mempertahankan program pengelolaan limbah padat Kota Cebu, dan harus dimulai dari visi hingga perkecambahan. Hal ini mencakup pelembagaan seluruh inisiatif pengelolaan limbah lingkungan mulai dari perumusan kebijakan, pengembangan dan implementasi program, serta

strategi penegakan hukum. Dengan seluruh inisiatif yang ada, peran Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Cebu untuk berkoordinasi dengan departemen lain di Pemerintah Kota Cebu, khususnya Departemen Pelayanan Publik, perlu dituangkan secara jelas dalam Kode Lingkungan Kota Cebu untuk melindungi lingkungan hidup. limbah. . kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan sasaran pelayanan publik lainnya. Analisis yang lebih rinci mengenai pendapatan rumah tangga, komunitas dan lokal sebagai respons terhadap serangkaian strategi pengelolaan limbah padat dari waktu ke waktu disarankan untuk memungkinkan pemahaman jangka panjang mengenai dampak program.

Penelitian keempat berjudul “EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAN SARANNA DAN PRASARANA SAMPAAH PADA PASAR MILIK PEMKOT PEKANBARU” yang dilakukan oleh (Herman et al., 2021). Untuk mengevaluasi praktik pengelolaan pada prasarana dan sarana sampah yang terdapat di pasar yang dikelola Pemkot Pekanbaru, penelitian ini mencoba merinci dan menjelaskan proses evaluasi tersebut. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru telah menyiapkan sarana dan prasarana di pasar punya Pemerintah Kota Pekanbaru, namun dari hasil penelitian dengan memakai teori yaitu Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact juga belum sepenuhnya terealisasi.

Penelitian kelima berjudul “EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS KEBEERSIHAN DAN PERTANAMAN KOTA PALU” yang dilakukan oleh (Rendy, 2019). Tujuan

penelitian ini yaitu guna memahami proses dari evaluasi yang sudah dipakai oleh Dinas Kebersihan dan juga Pertamanan Kota Palu dalam menilai kebijakan pengelolaan sampah terpadu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah terpadu telah dievaluasi, namun kebijakan tersebut masih belum optimal karena adanya kendala pada kriteria penilaian antara lain efektivitas, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi. Kurangnya dukungan dan ketidaktahuan adalah akar penyebab tidak efisiennya pengelolaan sampah. Efisiensi juga belum tercapai juga disebabkan masih kurangnya perilaku yang tak pantas dan juga rendahnya akan kesadaran lingk. Selain itu, waktu dari operasional pada pembuangan sampah juga belum seluruhnya terpenuhi. Akibat bau busuk dari tempat pembuangan sampah seperti TPS dan TPST, standar kecukupan belum mampu menjawab permasalahan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sehingga secara tidak langsung berdampak pada kesehatan dan kebersihan masyarakat.

Penelitian keenam berjudul “EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAN SAMPAH DI TPA KALIKONDANG KABUPATEN DEMAK” yang dilakukan oleh (Hardiyanti & Priyadi, 2020). Tujuan dari penelitian ini yaitu guna mengetahui efektivitas kebijakan dari pengelolaan sampah yang diterapkan di Kab. Demak khususnya pada TPA Kalikondang. Lima kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, keselarasan, daya tanggap, dan kebenaran digunakan untuk menentukan temuan penelitian. Karena kekurangan staf, fasilitas yang tidak memadai, dan infrastruktur yang tidak

memadai, sistem pengelolaan sampah pada TPA Kalikondang juga masih memakai metode pembuangan terbuka dan beroperasi dengan efisiensi di bawah standar untuk penimbunan, pengomposan, pencacahan, kolam kotoran, dan kolam lindi. Selain itu, biaya pengelolaan sampah masih belum optimal karena terbatas pada pembelian lahan dan bahan bakar truk sampah; biaya distribusi masih belum optimal karena pendanaan masih terfokus pada pembelian lahan dan bahan bakar truk sampah; dan respons terhadap listrik masih belum memadai. masih di bawah standar karena masyarakat terus mengeluarkan air limbah dan baunya.

Penelitian ketujuh berjudul “SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN THAILAND” yang dilakukan oleh (Thaniya Kaosol, 2019). Tujuan dari penelitian ini yaitu guna mengetahui Solusi Berkelanjutan untuk Pengelolaan Sampah Perkotaan di Thailand. Hasilnya menunjukkan bahwa jelas bahwa tidak ada satu pun metode pembuangan limbah yang dapat mengolah semua bahan dengan cara yang ramah lingkungan. “Keberlanjutan” menjadi kata kunci saat ini dan bukan merupakan topik baru. Persyaratan pengelolaan sampah yang wajar dan berkelanjutan adalah salah satu keluhan yang paling umum, terutama ketika ada kekhawatiran mengenai peningkatan jumlah timbulan sampah karena perbedaan tingkat pendapatan dan tingkat urbanisasi. Pendekatan yang tepat dalam pengelolaan sampah perkotaan harus merupakan pendekatan terpadu yang dapat memberikan kelestarian lingkungan dan ekonomi. Dengan meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan, sistem pengelolaan sampah

perkotaan yang terintegrasi mempunyai potensi untuk memaksimalkan bahan sampah yang dapat digunakan dan menghasilkan energi sebagai produk sampingannya. Di Thailand, komposisi sampah (86%) sebagian besar adalah sampah organik, kertas, plastik, kaca, dan logam. Hasilnya, sampah di Thailand sangat cocok untuk pengelolaan sampah terpadu. Dengan pengetahuan tersebut, kebijakan pengelolaan sampah Thailand mulai mendorong pemerintah daerah setempat untuk berkumpul secara berkelompok membangun fasilitas pusat pembuangan sampah dengan teknologi tepat guna dan mengurangi biaya pembuangan berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan.

Penelitian kedelapan berjudul “EFFECTIVENES OF SOLID WASTE POLICCCIES IN DEVELOPING COUNTRIIES: A CASE STUDY IN BRRAZIL” yang dilakukan oleh (Rui Cunha Marques, Tadeu Fabrício Malheiros, Natália Molina Cetrulo, Tiago Balieiro Cetrulo , Franciisco Silva Pinto, Rodrigoo Martins Moreiira, Alejandra Daniela Mendizábal-Cortés, , 2018). Tujuan dari penelitian ini yaitu guna menilai langsung efektivitas kebijakan limbah padat Brasil (PNRS). Metodologi studi kasus ini telah diterapkan di Brazil dimana terdapat kebijakan dan database limbah padat yang tersedia. Analisis statistik empiris terhadap data panel dilakukan untuk mengevaluasi apakah indikator utama kinerja pengelolaan sampah perkotaan membaik atau tidak. Temuan menunjukkan bahwa PNRS belum mencapai perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan sampah kota, terutama karena tidak adanya perbaikan signifikan yang terlihat pada indikator-indikator yang

diteliti: timbulan sampah kota, frekuensi pengumpulan sampah, laju daur ulang sampah yang diperoleh kembali, dan proporsi jumlah sampah yang dikumpulkan. tempat pembuangan sampah yang dibuang. Sehat. Makalah ini kemudian diakhiri dengan pembelajaran dan mendukung identifikasi kendala dan strategi yang dapat diekstrapolasi ke negara-negara berkembang lainnya.

Penelitian kesembilan berjudul “WASTE GENERATION AND MANAGEMENT IN BANGLADESH: AN OVERVIEW” yang dilakukan oleh (Md. Anwarul Abedin dan M. Jahiruddin, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sampah diproduksi dan dikelola di Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urbanisasi dan Industrialisasi yang disertai dengan pertumbuhan penduduk menjadi faktor utama peningkatan laju produksi sampah padat di Bangladesh. Sekitar 8000 ton sampah padat dihasilkan setiap hari dari enam kota besar di Bangladesh dan kota Dhaka sendiri menghasilkan sekitar 70% dari total sampah. Per timbulan sampah sekitar 400 g/hari. Sistem pengelolaan sampahnya kurang baik. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem pengumpulan tanah, pengangkutan, daur ulang, pembakaran dan penimbunan sampah. Namun, dengan keterbatasan kapasitas keuangan dan organisasi, sangat sulit bagi pemerintah untuk memastikan pelaksanaan layanan pengumpulan dan pembuangan limbah padat yang efisien dan tepat bagi seluruh masyarakat.

Penelitian kesepuluh berjudul “A REVIEW ON CURRENT STATUS OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN INDIA” yang dilakukan oleh (Neha Gupta, Krishnaa Kumar Yadav, Vinit Kumar, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau status terkini pengelolaan sampah kota di India. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan untuk mempelajari perubahan tren kuantitas dan karakteristik MSW. Perubahan pola komposisi sampah menekankan pentingnya pemilahan untuk keberhasilan pengoperasian fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah kota harus memelihara fasilitas penyimpanan sedemikian rupa sehingga tidak tercipta kondisi yang tidak higienis dan tidak sehat. Sebuah survei baru harus dilakukan mengenai pembentukan dan karakterisasi MSW di India. Karena MSW bersifat heterogen, sejumlah besar sampel harus dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan secara statistik.

Perbedaan yang telah peneliti lakukan sebelumnya dengan penelitian sebelumnya yang peneliti lakukan yaitu perbedaan lokasi penelitian, dan perbedaan indikator teori evaluasi peneliti terdahulu yang berbeda dengan indikator teori evaluasi yang peneliti gunakan. Kesamaan penelitian dengan yang sebelumnya sama penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang disusun melalui serangkaian langkah dan diciptakan pemerintah sendiri sebagai sarana guna mencapai tujuan sosial. Negara yang tidak memiliki kebijakan, maka peraturan di negara tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Menurut (Tahir, 2011), Istilah kebijakan sering digunakan secara bergantian dengan memakai istilah

yang lain seperti tujuan, program, dan peraturan perundang-undangan. Bagi pengambil kebijakan, banyak istilah tersebut tidak akan mengakibatkan masalah sebab menggunakan acuan yang sama.

Menurut (Anggara, 2014) menjelaskan tentang kebijakan publik sebagai berikut: “kebijakan pada biasanya dipakai guna memilih serta memperlihatkan pilihan yang sangat penting untuk menstabilkan kehidupan, baik di kehidupan kelompok organisasi pemerintahan ataupun swasta. Adapun Kebijakan juga wajib bebas dari konotasi / nuansa yang terkandung dalam kata seputar politik, yang mana seringkali bersifat politis dipercayai mengandung makna yang berpihak sebab kepentingan. Kebijakan dalam suatu ketentuan yaitu bersifat sah dan juga ditandai dengan adanya perilaku yang menunjukkan konsisten dan berulang-ulang, baik dari pihak yang menciptakan ataupun yang mematuhi (partai dipengaruhi oleh kebijakan tersebut) juga kelompok yang dipilih kurang lebih juga saling berhubungan (termasuk dalam keputusan guna tak mengambil tindakan) yang diciptakan lembaga dan juga pejabat pemerintah.”

Jenkins menyajikan gambaran konseptual kebijakan publik di (Solichin, 2012) “Kebijakan publik merupakan kelompok keputusan yang sudah saling berhubungan yang dibawa oleh para aktor politik ataupun sekelompok aktor, mengenai tujuan yang telah dipilihnya dan bagaimana menggapainya didalam situasi tertentu,” sesuai dengan definisi yang diberikan di atas. Para aktor ini masih mempunyai kekuatan untuk membuat penilaian secara teori. Lemieux, sementara itu, sangat dalam (Solichin, 2012) Hal ini

memaparkan bahwa “kebijakan publik merupakan suatu prodak kegiatan yang bermaksud gunamenyelesaikan permasalahan publik yang telah terjadi dalam suatu lingk. tertentu yang dilaksanakan oleh akto-aktor politik yang terstruktur hubungannya”.

Menurut (James, 1979), “Yang pertama, kegiatan / tujuan dari yang berorientasi pada tujuan harus menjadikan perhatian yang utama terhadap peristiwa / perilaku acak yang terjadi secara tiba-tiba,” ujarnya mengacu pada lima aspek kebijakan publik. Kedua, kebijakan pejabat pemerintah adalah tindakan umum mereka dalam melaksanakan penilaian mereka sendiri. Ketiga, kebijakan harus didasarkan pada yang serejujurnya dilaksanakan pemerintah, dan bukan hanya pada apa yang ingin mereka laksanakan atau janjikan. Keempat, format kebijakan dapat bersifat menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kelima, kewenangan dan ketentuan hukum merupakan landasan kebijakan publik yang baik. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan pemerintah merupakan tujuan berasal kebijakan publik.

Berdasarkan kutipan di atas, kebijakan publik sangat penting bagi pemerintah dan diterapkan guna menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Keputusan pemerintah yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan kepentingan publik kadang-kadang disebut sebagai kebijakan.

2.2.2 Evaluasi Kebijakan

Agar kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada warganya, evaluasi sering kali bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. sejauh mana tujuan terpenuhi dan besarnya ketimpangan antara

kenyataan ataupun harapan. Persis yang diungkapkan oleh (Winarno, 2007) Secara luas, bisa dibayangkan bahwa evaluasi kebijakan yaitu suatu proses yang melibatkan estimasi atau penilaian kebijakan, termasuk konten, pelaksanaan, dan dampaknya.

Lester dan Stewart pada (Winarno, 2007), menunjukkan bahwa adanya evaluasi pada Kebijakan ini bisa dibagi menjadi 2 tugas berbeda, yaitu sebagai berikut: "Tugas pertama adalah mendeskripsikan pengaruh suatu kebijakan untuk menentukan konsekuensi yang ditimbulkannya. Tugas yang kedua yaitu mengevaluasi kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, dengan mempertimbangkan norma-norma atau persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran dan penilaian tahapan implementasi kebijakan serta konsekuensi atau dampak dari suatu program atau pelaksanaan kebijakan tertentu merupakan bentuk evaluasi kebijakan yang sebenarnya yang membantu menentukan apa yang dapat dilakukan. dilakukan berikutnya. diambil; diambil nanti."

Menurut (Nugroho, 2014), menunjukkan bahwa tujuan umum penilaian kebijakan adalah untuk mengukur seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan. Setelah tugas selesai dilakukan evaluasi. Untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, diperlukan evaluasi.

(Dunn, 1981) Evaluasi diartikan sebagai "proses menghasilkan pengetahuan yang sanbat berhubungan dengan keputusan kebijakan mengenai

kesenjangan dengan kinerja yang diinginkan dan kinerja aktual suatu kebijakan.” Hal ini membantu pengambil keputusan selama tahap proses peninjauan kebijakan. Evaluasi melibatkan lebih dari sekedar menentukan sejauh mana kebijakan telah diterapkan. Permasalahan telah diperbaiki, namun hal ini juga membantu memperjelas dan mengkritik prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan tersebut, sehingga membantu merumuskan kembali dan mengadaptasi permasalahan.

Menurut berbagai sudut pandang ahli mengenai hal ini, evaluasi adalah suatu prosedur yang menetapkan sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai. Evaluasi juga mencakup penentuan apakah hasil kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program konsisten dengan apa yang direncanakan secara efektif dan efisien. Evaluasi juga dapat mempelajari lebih lanjut mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan, dan jika terdapat penyimpangan, perubahan dapat dilakukan untuk menjadikan kebijakan tersebut lebih baik.

2.2.3 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pengelola, dan/atau pemerintah secara keseluruhan (Neolaka, 2008). Pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan bahan limbah semuanya termasuk dalam pengelolaan limbah. (Alex, 2012).

Putnam dalam (Field, 2010) menyoroti bagaimana modal sosial, yang berbentuk jaringan, norma, dan keyakinan, merupakan bagian dari kehidupan

sosial dan apa yang menginspirasi orang untuk berkolaborasi secara lebih efektif guna mencapai tujuan bersama. Produktivitas baik secara individu maupun kolektif dipengaruhi oleh hubungan sosial dan nilai-nilai yang ditemukan dalam jaringan sosial. Jaringan sosial, konvensi, dan keyakinan semuanya berperan dalam pengembangan hubungan pribadi. Menurut (Damsar dan Indrayani, 2012) Sekelompok interaksi interpersonal tertentu di mana kepercayaan dipupuk dan dipelihara oleh norma-norma bersama disebut sebagai jaringan sosial yang dalam. Kemudian Robert M.Z. Gerbang dalam (Damsar dan Indrayani, 2012) mengklaim bahwa modal sosial, juga dikenal sebagai kekuatan sosial, adalah seluruh kekuatan sosial yang dikembangkan suatu masyarakat dalam kaitannya dengan institusi sosial. Berdasarkan analisis mereka, modal sosial dapat digunakan dengan sukses dan efisien untuk mencapai tujuan individu atau kelompok. Dengan demikian, agar keberhasilan dan efisiensi mencapai tujuan individu atau individu, modal sosial dapat didefinisikan sebagai investasi sosial yang menggabungkan modal lain dengan sumber daya sosial seperti jaringan, sikap, nilai, dan norma serta unsur-unsur yang membentuk struktur sosial. koneksi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Cara kita berpikir memberikan penjelasan jangka pendek atas gejala-gejala yang menjadi fokus permasalahan kita. Berdasarkan analisis literatur dan temuan penelitian terkait, pembenaran dibuat. Pendekatan berikut dikembangkan untuk mempelajari bagaimana peneliti menjelaskan diri mereka sendiri:

Kriteria Evaluasi dari William N. Dunn yang terdapat 6 indikasi merupakan teori yang dipakai dalam mengkaji dari adanya penelitian ini sebagai parameter evaluasi dari Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Blitar. Yaitu 1) Efektifitas 2) Efisiensi 3) Kecukupan 4) Perataan 5) Responsivitas dan 6) Ketepatan.

BAGAN KERANGKA BERFIKIR

